BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi komponen penting dari pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memainkan peran penting dalam memasok tenaga kerja migran internasional, yang dikenal dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kesiapan, sedang menjalani, atau pernah menjalani pekerjaan di luar negeri dengan tujuan memperoleh penghasilan, Wulandari & Dewi (2023). Berbagai faktor sosial dan ekonomi di tingkat rumah tangga dan desa juga memengaruhi proses pengambilan keputusan untuk menjadi PMI. Rendahnya tingkat pendapatan di daerah asal merupakan salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini turut didukung oleh temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rabbani (2022), ditemukan bahwa sebagian besar responden di Dusun Bantir, Lombok Barat, bekerja sebagai petani tradisional atau buruh tani dengan penghasilan yang rendah dan tidak menentu Ketidakstabilan kondisi ekonomi mendorong banyak individu dan keluarga untuk memandang peluang kerja di luar negeri sebagai alternatif guna mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup seharihari.

Penelitian lain yang dilakukan Amalia (2024) di Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa perbedaan pendapatan yang cukup besar antara dalam negeri dan luar negeri turut membentuk harapan ekonomi calon PMI. Dalam studi

tersebut, tercatat bahwa 87% responden menyatakan motivasi atau Tujuan utama mereka menjadi PMI adalah meraih penghasilan yang lebih tinggi melalui pekerjaan di luar negeri, bukan semata karena tidak memiliki pekerjaan di tanah air. Bahkan, sebagian dari mereka menyampaikan harapan untuk menggunakan penghasilan tersebut guna membeli rumah, membiayai pendidikan anak, serta meningkatkan posisi sosial mereka di tengah masyarakat.

Kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dalam sistem ketenagakerjaan nasional, terutama melalui pengiriman remitansi yang memperkuat perekonomian dalam negeri. Remitansi ini tidak hanya menjadi sumber devisa negara, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga PMI dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. KemenP2MI (2024) Pekerja Migran Indonesia kebanyakan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Lampung. Lebih dari 70% dari total penempatan Pekerja Migran Indonesia berada di ketiga provinsi ini. KemenP2MI (2024) juga mengatakan bahwa Remitansi yang dikirim oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai nilai yang signifikan sebesar USD 15,54 miliar atau setara dengan Rp 251,1 triliun (menggunakan asumsi kurs Rp 16.159 per USD) pada tahun 2024, meningkat sekitar 14% dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya sebesar USD 14,22 miliar. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah meningkatkan literasi keuangan dan menyediakan layanan dan perlindungan yang lebih baik,

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri mencapai 297.434 jiwa pada tahun 2024, dengan paling banyak di Provinsi Jawa Timur, menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Jumlah Pekerja Migran Indonesia 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Lampung Bali Sumatera Banten Jawa Jawa Jawa Nusa Nusa Sumatera Timur Tengah Barat Utara Tenggara Selatan Tenggara Timur **Barat** 6 8 9 10

Gambar 1 Distribusi PMI berdasarkan provinsi asal

Sumber: BP2MI 2024

Berdasarkan data di atas distribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Mayoritas berasal dari Jawa Timur (79.339 PMI), Jawa Tengah (66.611 PMI), dan Jawa Barat (61.556 PMI), berdasarkan provinsi ketiga provinsi ini memiliki tradisi migrasi tenaga kerja yang kuat. Faktor pendorong tradisi ini adalah jaringan sosial yang mendukung perpindahan tenaga kerja ke luar negeri serta faktor utama berupa keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Selain itu Lampung yang juga menyumbang PMI yang cukup signifikan dengan (25.162 PMI) berbanding dengan Banten yang memiliki (3.567) yang menjadikan Banten dengan provinsi dengan PMI paling rendah di pulau Jawa.

Menurut penelitian oleh Rizqi (2023), Beberapa alasan yang mendorong orang untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk Pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi keluarga yang kurang, serta pengaruh lingkungan menjadi faktor pendorong. Rendahnya tingkat pendidikan membuat seseorang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri, sebagai alternatif

untuk meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga mereka. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas sering kali memaksa seseorang untuk mencari sumber pendapatan tambahan, dan lingkungan sekitar yang mendukung atau budaya migrasi turut mempengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi PMI.

Semua faktor ini berkorelasi satu sama lain dan berkontribusi pada peningkatan jumlah orang yang mencari peluang kerja di luar negeri. Studi yang dilakukan Handayani (2018) mengkaji minat masyarakat terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dikaji berdasarkan latar belakang pendidikan dan tingkat pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk bekerja di luar negeri sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan penghasilan mereka. Secara khusus, ditemukan bahwa minat untuk menjadi PMI cenderung lebih tinggi pada mereka yang memiliki pendidikan lebih baik. Dorongan ini muncul karena keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang lebih besar di luar negeri, yang sesuai dengan kemampuan serta latar belakang kualifikasi mereka. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan keluarga, orang cenderung mencari pekerjaan di luar negeri karena pendapatan rendah di daerah asal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi migrasi PMI, peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja lokal yang memadai sangat penting.

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI (2024) tingkat pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunjukkan variasi yang cukup signifikan berdasarkan data yang tersedia. Mayoritas PMI memiliki tingkat Pendidikan menengah, sementara jumlah pekerja dengan tingkat

Pendidikan tinggi sangat terbatas. Berikut adalah rincian tingkat Pendidikan PMI dalam bentuk tabel

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia

| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| SD | 39.246 | 68.544 | 69.421 | 177.211 |
| SMP | 64.014 | 92.564 | 91.542 | 248.120 |
| SMA/SMK | 90.954 | 128.104 | 128.480 | 347.538 |
| Diploma | 4.244 | 4.453 | 4.505 | 13.202 |
| Sarjana | 2.212 | 3.383 | 3.421 | 9.016 |
| Pasca Sarjana | 47 | 60 | 65 | 172 |
| Total | 200.717 | 297.108 | 297.434 | 795.259 |

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2024)

Dari data tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mayoritas memiliki latar belakang pendidikan menengah, dengan 43,2% lulusan SMA/SMK. Temuan ini membuktikan bahwa sebagian besar pekerja migran mempunyai keterampilan dasar yang cukup untuk bekerja di berbagai industri, seperti manufaktur, jasa, dan perkantoran. Namun, jumlah PMI dengan latar belakang pendidikan rendah masih cukup tinggi, dengan 30,8% lulusan SD dan 23,3% lulusan SMP, hal ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar pekerja migran masih bergantung pada sektor informal, seperti pekerjaan rumah tangga, perkebunan, dan pekerjaan kerah biru lainnya yang tidak perlu memerlukan Pendidikan tinggi. Meskipun begitu, jumlah pekerja migran yang memiliki pendidikan tinggi seperti Diploma, Sarjana, hingga Pasca Sarjana masih sangat sedikit, yaitu kurang dari 5% dari total pekerja migran pada tahun 2024.

Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh dua penyebab utama yang pertama adalah fakta bahwa lulusan perguruan tinggi lebih cenderung mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pendidikan mereka di dalam negeri yang kedua adalah fakta bahwa, dibandingkan dengan karyawan sektor informal, peluang kerja profesional di luar negeri lebih sedikit. Selain itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi PMI adalah ketidaksesuaian yang cukup besar antara jenjang pendidikan mereka dan jenis pekerjaan yang tersedia di luar negeri. Banyak pekerja dengan pendidikan menengah atau tinggi dipaksa bekerja di bidang yang tidak memenuhi kualifikasi mereka yang disebut sebagai *overeducation*. Sebaliknya, pekerja dengan pendidikan rendah dipaksa bekerja di bidang yang seharusnya membutuhkan keterampilan tinggi bahkan lebih atau *undereducation*.

Keputusan pemuda untuk menjadi PMI dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi ekonomi, tingkat Pendidikan, dan faktor sosial. Sari (2024) mengungkapkan bahwa pemuda Ponorogo cenderung bekerja di luar negeri karena masalah pendidikan dan masalah keuangan keluarga, meninggalkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan untuk memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Di samping itu, studi yang dilakukan oleh Angelina (2020) menekankan bahwa persepsi pemuda desa terhadap pekerjaan sebagai PMI terkait dengan keinginan untuk meningkatkan standar hidup dan stabilitas finansial. Ini terjadi meskipun mereka menghadapi masalah seperti lapangan kerja yang terbatas di daerah mereka dan kurangnya kualifikasi pendidikan. Secara keseluruhan, data dan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah di kalangan pemuda Ponorogo berkontribusi secara signifikan terhadap keputusan mereka untuk menjadi PMI. Selain itu, kekurangan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka

mendorong para pemuda ini dengan tujuan mendapatkan pekerjaan di luar negeri guna memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan keluarga mereka.

Menurut Setyaji & Sri Setiawati (2023) Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 964.253 jiwa pada tahun 2022, yang meningkat menjadi 972.582 jiwa pada tahun 2023. Terbatasnya peluang kerja di daerah tersebut memicu tingginya angka kemiskinan, ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat Ponorogo untuk memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, kurangnya pendidikan dan kemampuan yang dimiliki sebagian besar penduduk Ponorogo memengaruhi hal ini. Oleh karena itu, dianggap sebagai opsi terbaik untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan kontribusi bagi keluarga di kampung halaman adalah menjadi PMI di luar negeri. Aning & Sari (2024) dalam hasil penelitiannya uang yang dikirim ke Indonesia digunakan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka, seperti membangun rumah, membeli perabotan rumah, bayar listrik dan lain-lain.

Kabupaten Ponorogo adalah pengirim pekerja migran terbesar di Jawa Timur, menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, (2024). Kabupaten Ponorogo tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengiriman pekerja migran terbesar di Jawa Timur. Data tersebut memperlihatkan tren yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, di mana Ponorogo terus mendominasi dalam kontribusi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.

Tabel 2 Jumlah Pekerja Migran Jawa Timur 2024

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | Ponorogo | 11.329 |
| 2 | Blitar | 10.652 |
| 3 | Malang | 10.288 |
| 4 | Tulungagung | 8.029 |
| 5 | Banyuwangi | 6.758 |
| 6 | Madiun | 5.253 |
| 7 | Kediri | 4.316 |
| 8 | Trenggalek | 3.532 |
| 9 | Magetan | 3.211 |
| 10 | Kabupaten/kota lain-lain | 15.974 |

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2024

Menurut data BP2MI diatas, beberapa kabupaten/kota memiliki pekerja migran yang paling banyak se-jawa timur. Ponorogo memiliki jumlah tertinggi dengan 11.329 orang, diikuti oleh Blitar dengan 10.652 orang, dan Malang dengan 10.288 orang. Tulungagung menempati urutan keempat dengan 8.029 pekerja migran, sementara Banyuwangi memiliki 6.758. Madiun memiliki 5.253 pekerja migran, dan Kediri memiliki 4.316 pekerja migran. Trenggalek dengan 3.532 pekerja migran. Magetan dengan 3.211 orang, meskipun berada di urutan terakhir, tetap menunjukkan partisipasi yang signifikan. Data dari berbagai wilayah Jawa Timur yang tidak termasuk dalam daftar utama dikumpulkan dalam kategori "Kabupaten/Kota Lain-lain". Ini menunjukkan bahwa migrasi pekerja migran tidak hanya terjadi di daerah yang dulunya dikenal sebagai kantong PMI seperti Ponorogo atau Blitar, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini memiliki jumlah tertinggi dengan 15.974 orang. Kebanyakan warga Ponorogo

bekerja sebagai petani atau buruh tani. Meskipun lahan pertaniannya luas, hanya sedikit orang yang benar-benar memilikinya. Di lain sisi, menyekolahkan anakanak hanya sampai SMP atau SMA adalah tugas yang sangat sulit bahkan untuk memiliki sepeda motor. Jadi, menjadi PMI adalah salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi, seperti membeli sepeda motor dan membangun rumah.

Tren sosial yang muncul di media sosial, seperti tagar '#KaburAjaDulu', turut berkontribusi terhadap meningkatnya arus migrasi. Tagar ini mencerminkan sikap kritis dan bernada satir dari kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial dan politik dalam negeri, sekaligus menjadi dorongan bagi mereka untuk mengejar peluang kerja atau pendidikan di luar negeri. Hal ini mengidentifikasi adanya keterkaitan antara dinamika sosial media dan keputusan pemuda untuk bermigrasi. penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2023) juga menunjukkan peran media sosial dalam pengambilan keputusan migrasi, bahwa media sosial tidak hanya menyediakan informasi tetapi juga membantu orang berkomunikasi dalam jaringan migran, yang keduanya berdampak langsung pada keputusan migrasi. Media sosial dianggap berperan penting dalam pengambilan keputusan tentang migrasi internasional karena memberi orang akses ke kekuatan sosial dan elemen yang mendorong migrasi internasional.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Motivasi Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Studi Empiris: LPK YTC Ponorogo"

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh motivasi ekonomi terhadap keputusan menjadi
 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ?
- Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap keputusan menjadi
 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ?
- c. Bagaimana pengaruh faktor sosial terhadap keputusan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ?
- d. Bagaimana pengaruh antara motivasi ekonomi, tingkat pendidikan, dan faktor sosial terhadap keputusan individu untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ?
- e. Faktor apa yang paling banyak mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menjadi pekerja migran ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh motivasi ekonomi terhadap keputusan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap keputusan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- c. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap keputusan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- d. Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi ekonomi, tingkat pendidikan, dan faktor sosial terhadap keputusan individu untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- e. Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan untuk menjadi pekerja migran tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan dan migrasi tenaga kerja, khususnya dalam memahami bagaimana motivasi ekonomi, tingkat pendidikan, dan faktor sosial memengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

b. Manfaat Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait, seperti calon PMI, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan pemerintah daerah. Bagi calon PMI, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dan terencana. Bagi LPK, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta.

PONOROG